

RB

657.61

BAS

S C.1

Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar

Edisi Ketiga

		PERPUSTAKAAN Nasional RI	
No. Inv	1-ea-2017 / C.1		
Tanggal	1-8-2017		
Paraf			

Indra Bastian



PENERBIT ERLANGGA

Jl. H. Baping Raya No.100

Ciracas, Jakarta 13740

www.erlangga.co.id

(Anggota IKAPI)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	vi
BAB 1 PENGANTAR	1
1.1. Definisi Akuntansi Sektor Publik.....	3
1.1.1 Peranan Akuntansi Sektor Publik	4
1.1.2 Fenomena Terkait Akuntansi Sektor Publik	5
1.2. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik.....	6
1.3. Elemen-elemen Akuntansi Sektor Publik.....	7
1.4. Lingkup Organisasi Sektor Publik	10
1.4.1 Pengertian dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik.....	10
1.4.2 Sejarah dan Perkembangan Organisasi Sektor Publik dari Sudut Akuntansi.....	12
1.4.3 Skala dan Cakupan Organisasi Sektor Publik.....	14
1.5. Profesi Akuntan Sektor Publik.....	15
1.6. Fitur Ideologi Dalam Manajemen Organisasi Sektor Publik	17
1.6.1 Konsep Sektoral Ekonomi.....	17
1.6.2 Konsep 'Reinventing Government'	19
1.7. Perubahan Pemikiran Orde Baru Ke Orde Reformasi.....	20
1.8. Tinjauan Hubungan Antarbab	23
Esai.....	24
Soal-soal.....	24
Studi Kasus.....	25
BAB 2 REGULASI KEUANGAN PUBLIK	31
2.1. Definisi Regulasi Publik.....	33
2.2. Teknik Penyusunan Regulasi Publik	33
2.3. Regulasi Dalam Siklus Akuntansi Sektor Publik.....	34
2.4. Penyusunan Regulasi Publik	37
2.5. Review Regulasi Akuntansi Sektor Publik	39
2.6. Dasar Hukum Keuangan Publik di Indonesia.....	42
2.6.1. Dasar Hukum Keuangan Negara.....	42
2.6.2. Dasar Hukum Keuangan Daerah.....	47
2.6.3. Dasar Hukum Keuangan Organisasi Publik Lainnya.....	47
2.7. Permasalahan Regulasi Keuangan Publik di Indonesia	48
Esai.....	49
Soal-soal.....	49
Studi Kasus.....	51

BAB 3 KOMPARASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN AKUNTANSI BISNIS	55
3.1. Perkembangan Pemikiran Akuntansi.....	57
3.1.1. Sektor Publik versus Sektor Bisnis (Swasta)	57
3.1.2. Perlunya Akuntansi Sektor Publik Dipelajari Tersendiri.....	58
3.2. Tujuan Komparasi Akuntansi Sektor Publik versus Sektor Bisnis (Swasta).....	59
3.3. Asumsi-asumsi Akuntansi Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Swasta).....	59
3.4. Akuntansi Sektor Publik versus Sektor Bisnis (Swasta).....	60
3.4.1. Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dengan Akuntansi Sektor Bisnis (Swasta).....	60
3.4.2. Akuntansi Sektor Publik yang Tertinggal dari Akuntansi Bisnis (Swasta)	60
3.4.3. Akuntansi atas Utang atau Kewajiban Organisasi Publik	60
3.4.4. Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas	61
3.4.5. Kultur Organisasi Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Swasta).....	64
3.4.6. Dasar Hukum Akuntansi Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Swasta)	65
3.5. Pengambilan Keputusan dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Swasta)	68
3.6. Perencanaan dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Swasta).....	69
3.7. Penganggaran dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Swasta)	71
3.8. Realisasi Anggaran dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Swasta).....	72
3.9. Pengadaan Barang dan Jasa dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Swasta)	72
3.10. Pelaporan dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Swasta)	73
3.11. Audit dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Swasta).....	74
3.12. Pertanggungjawaban dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Swasta)	75
Esai	76
Soal-soal	76
Studi Kasus	77
 BAB 4 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK	 81
4.1. Definisi Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik	83
4.2. Tujuan dan Peranan Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik.....	84
4.3. Lingkup Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik	84
4.4. Asumsi Akuntansi Sektor Publik	86
4.4.1. Kebutuhan Masyarakat.....	86
4.4.2. Alokasi Sumber Daya.....	87
4.4.3. Ketaatan Hukum/Peraturan.....	87
4.4.4. Dasar Akrua	88
4.4.5. Kelangsungan Organisasi.....	88
4.4.6. Akuntabilitas Kinerja	88
4.5. Implementasi Karakteristik Kualitatif Akuntansi Sektor Publik.....	88
4.5.1. Kualitas Perencanaan Publik.....	92
4.5.2. Kualitas Penganggaran Publik.....	94
4.5.3. Kualitas Realisasi Anggaran Publik.....	96
4.5.4. Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Publik	98
4.5.5. Kualitas Pelaporan Sektor Publik.....	101
4.5.6. Kualitas Audit Sektor Publik.....	110
4.5.7. Kualitas Pertanggungjawaban Publik.....	111
4.6. Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Publik.....	113
4.6.1. Definisi Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Publik.....	113
4.6.2. Faktor yang berpengaruh dalam Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Publik.....	114
4.6.3. Aktiva	115
4.6.4. Kewajiban	115

4.6.5	Ekuitas	115
4.6.6	Pendapatan	115
4.6.7	Biaya	116
	Esai	116
	Soal-soal	117
	Studi Kasus	118
BAB 5	STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK	121
5.1	Definisi Standar Akuntansi Sektor Publik	123
5.2	Lingkup Standar Akuntansi Sektor Publik	123
5.3	Ragam dan Hubungan Antarstandar Akuntansi Sektor Publik	124
5.4	Kebutuhan Standar Akuntansi Sektor Publik di Indonesia	125
5.5	Teknik Penyusunan Standar	126
5.6	Standar Nomenklatur	127
5.6.1	Definisi Nomenklatur	127
5.6.2	Tujuan Penyusunan Nomenklatur	127
5.6.3	Hal-hal yang Harus Dipertimbangkan dalam Menyusun Nomenklatur	127
5.6.4	Metode Penyusunan Nomenklatur	128
5.7	Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik	130
5.7.1	PSAK No.45 tentang Standar Akuntansi untuk Entitas Nirlaba	130
5.7.2	Laporan Keuangan yang Dihasilkan	131
5.7.3	Unsur-unsur Laporan Keuangan	135
5.7.4	Standar Akuntansi Pemerintahan	137
5.7.5	International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)	142
5.8	Standar Audit Sektor Publik	145
5.8.1	Terbitnya SPKN	145
5.8.2	INTOSAI	147
5.9	Standar Akuntansi Biaya Sektor Publik	147
5.9.1	Pemahaman Standar Akuntansi Biaya Sektor Publik	147
5.9.2	Standar Akuntansi Biaya Sektor Publik versus Prinsip-prinsip Biaya	149
5.9.3	Penggunaan Standar Akuntansi Biaya Sektor Publik	149
5.9.4	Jenis Cakupan Standar Akuntansi Biaya Sektor Publik	149
5.9.5	Pernyataan Pengungkapan (<i>Disclosure Statements</i>)	150
5.9.6	Kebutuhan Standar Akuntansi Biaya Sektor Publik	150
5.9.7	Contoh Standar Akuntansi Sektor Publik	154
	Esai	159
	Soal-soal	159
	Studi Kasus	161
BAB 6	PERENCANAAN PUBLIK	163
6.1	Teori Perencanaan Publik	165
6.2	Sistem Perencanaan Publik	168
6.3	Siklus Perencanaan Publik	170
6.3.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Tahun Lalu dan Penetapan Prosedur Perencanaan	170
6.3.2	Organisasi Pendukung Perencanaan	171
6.3.3	Penetapan Asumsi Perencanaan	171
6.3.4	Kriteria Evaluasi Hasil Perencanaan	171
6.3.5	Penyusunan Indikator Program	172
6.4	Teknik Perencanaan Publik	172
6.5	Contoh Praktek Perencanaan Publik	177

Esai	183
Soal-soal	183
Studi Kasus	185

BAB 7 PENGANGGARAN PUBLIK 189

7.1. Teori Penganggaran Publik	191
7.1.1. Pengertian Anggaran Publik	191
7.1.2. Fungsi Anggaran Publik	191
7.1.3. Pengaruh dan Tujuan Anggaran Publik	192
7.1.4. Karakteristik Anggaran Publik	192
7.1.5. Prinsip-prinsip Anggaran Publik	193
7.2. Sistem Penganggaran Publik	193
7.2.1. Line Item Budgeting	194
7.2.2. Incremental Budgeting	196
7.2.3. Planning Programming Budgeting System	197
7.2.4. Zero Based Budgeting	198
7.2.5. Performance Budgeting	202
7.2.6. Medium Term Budgeting Framework (MTBF)	205
7.3. Siklus Penganggaran Publik	208
7.3.1. Penetapan Prosedur dan Tim Penganggaran Tahun Terkait	208
7.3.2. Penetapan Dokumen Standar Harga	209
7.3.3. Penyebaran dan Pengisian Formulir Rencana Kerja dan Anggaran	209
7.3.4. Rekapitulasi Kertas Kerja	209
7.3.5. Pembahasan Perubahan dan Penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja	209
7.3.6. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja	209
7.4. Teknik Penganggaran Publik	212
7.4.1. Pendekatan Fungsional	212
7.4.2. Pendekatan Pengambilan Keputusan	215
7.4.3. Pendekatan Psikologi/Motivasi	215
7.4.4. Pendekatan Lingkungan Berkesinambungan	216
7.5. Contoh Penganggaran di Organisasi Sektor Publik	217
7.6. Penganggaran Publik di Berbagai Negara Maju dan Berkembang	223
Esai	225
Soal-soal	225
Studi Kasus	227

BAB 8 REALISASI ANGGARAN PUBLIK 229

8.1. Teori dalam Realisasi Anggaran Publik	231
8.2. Sistem Realisasi Anggaran Publik	235
8.3. Siklus Realisasi Anggaran Publik	239
8.4. Teknik Realisasi Anggaran Publik	241
8.4.1. Peramalan	241
8.4.2. Manajemen Bahan	243
8.4.3. Sistem Persediaan	244
8.4.4. Sistem Produksi	246
8.4.5. Perencanaan Sumber Daya Manusia	247
8.4.6. Penjadwalan	248
8.4.7. Pengendalian	249
8.4.8. Keuangan	251
8.4.9. Pemasaran Produk/Jasa	253
8.4.10. Pemberian Jasa	254

8.4.11 Kualitas (Kinerja)	254
8.5. Contoh Realisasi Anggaran di Organisasi Sektor Publik	255
Esai	258
Soal-soal	258
Studi Kasus	259
BAB 9 PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK	261
9.1. Teori Barang dan Jasa Publik	263
9.1.1. Sifat dan Lingkup Pengadaan Barang dan Jasa Publik	263
9.1.2. Tujuan Pengadaan Barang dan Jasa Publik	265
9.1.3. Isu-isu Organisasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik	267
9.1.4. Apa yang Didelegasikan dan Kapan?	268
9.1.5. Menjaga Keterpaduan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik	269
9.1.6. Barang dan Jasa Publik vs Barang dan Jasa Swasta	271
9.1.7. Standar Harga	273
9.1.8. Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik	274
9.2. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Publik	275
9.2.1 Kerangka Kerja Hukum dan Peraturan Bagi Pengadaan Barang dan Jasa	275
9.2.2 Penggunaan Kode Model (<i>Model Codes</i>)	276
9.2.3 Manual dan Prosedur	276
9.3. Siklus Pengadaan Barang dan Jasa Publik	279
9.3.1. Penetapan Peraturan Pelaksanaan Anggaran	279
9.3.2. Distribusi Anggaran ke Masing-masing Organisasi/Unit	279
9.3.3. Pembuatan Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa	279
9.3.4. Penentuan Program yang Membutuhkan Pengadaan Barang dan Jasa	280
9.3.5. Analisa Anggaran Pengadaan	280
9.3.6. Pengumuman Pengadaan	280
9.3.7. Proses Tendering	280
9.3.8. Pengumuman Hasil Pengadaan	280
9.3.9. Penandatanganan SPK	280
9.3.10. Pengerjaan Pengadaan	280
9.3.11. Serah Terima Barang/Jasa	280
9.3.12. Proses Kepemilikan dan Penggunaan Barang dan Jasa	281
9.4. Teknik Pengadaan Barang dan Jasa Publik	281
9.4.1. Proses Pengadaan Barang dan Jasa	281
9.4.2. Bentuk Pengadaan Barang dan Jasa	284
9.4.3. Administrasi Kontrak dan Pengawasan	286
9.4.4. Pengawasan Pelaksanaan Kontrak	287
9.4.5. Pengadaan Barang dan Jasa Militer	287
9.5. Contoh Praktek Pengadaan Barang dan Jasa di Organisasi Sektor Publik	288
Esai	291
Soal-soal	291
Studi Kasus	293
BAB 10 PELAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK	295
10.1. Teori Pelaporan dalam Sektor Publik	297
10.1.1. Laporan Keuangan di Organisasi Sektor Publik	297
10.1.2. Jenis Laporan Keuangan Sektor Publik	297
10.1.3 Contoh Analisis Keuangan Publik	302
10.1.4 Bentuk-bentuk Laporan Keuangan Sektor Publik	303

10.2. Sistem Pelaporan Keuangan Sektor Publik.....	310
10.2.1. Dasar Kas.....	310
10.2.2. Dasar Akumul.....	313
10.2.3. Akuntansi Dana.....	316
10.3. Siklus Akuntansi Keuangan Sektor Publik.....	318
10.3.1. Transaksi.....	318
10.3.2. Analisis Bukti Transaksi.....	318
10.3.3. Mencatat Data Transaksi.....	318
10.3.4. Mengelompokkan dan Mengikhtisarkan Data yang Dicatat (Posting).....	319
10.3.5. Penerbitan laporan dan Catatannya.....	319
10.4. Teknik Pelaporan Keuangan Sektor Publik.....	319
10.5. Contoh Laporan Keuangan Sektor Publik dan Unsur-unsurnya di Organisasi Sektor Publik.....	336
10.6. Contoh Laporan Keuangan Sektor Publik dan Unsur-unsurnya di Negara-negara Lain.....	345
Esai.....	346
Soal-soal.....	349
Studi Kasus.....	351
BAB 11 AUDIT SEKTOR PUBLIK.....	355
11.1. Teori Audit Sektor Publik.....	357
11.1.1. Definisi Audit Sektor Publik.....	357
11.1.2. Regulasi Audit Sektor Publik.....	358
11.1.3. Audit Sektor Publik dan Audit Sektor Bisnis.....	358
11.1.4. Jenis-jenis Audit Sektor Publik.....	359
11.1.5. Audit Keuangan Sektor Publik.....	359
11.2. Sistem Audit Keuangan Sektor Publik.....	360
11.3. Siklus Audit Keuangan Sektor Publik.....	366
11.3.1. Perencanaan Audit Keuangan.....	366
11.3.2. Penetapan Regulasi Audit Keuangan.....	367
11.3.3. Penyusunan Perencanaan Audit Tahunan oleh Lembaga Auditor.....	367
11.3.4. Temu Rencana Audit Tahunan.....	367
11.3.5. Penerbitan Regulasi tentang Tim dan Kebijakan Audit Tahunan.....	367
11.3.6. Penerimaan Regulasi Organisasi yang Akan Diaudit.....	368
11.3.7. Survei Awal Karakter Industri/Organisasi yang Akan Diaudit.....	368
11.3.8. Pembuatan Program Audit.....	368
11.3.9. Penerbitan Surat Tugas Audit.....	368
11.3.10. Pelaksanaan Audit Keuangan.....	368
11.3.11. Pembuatan Daftar Temuan.....	369
11.3.12. Pembicaraan Awal tentang Daftar Temuan.....	369
11.3.13. Penyusunan Draft Laporan Hasil Pemeriksaan.....	370
11.3.14. Pembahasan Draft Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Organisasi yang Diaudit.....	370
11.3.15. Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan.....	370
11.3.16. Tindaklanjut Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan.....	370
11.3.17. Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan.....	370
11.4. Teknik Audit Keuangan Sektor Publik.....	370
11.5. Contoh Praktek Audit Sektor Publik di Organisasi Sektor Publik.....	373
Esai.....	380
Soal-soal.....	380
Studi Kasus.....	382

BAB 12 PERTANGGUNGJAWABAN PUBLIK	383
12.1. Teori Pertanggungjawaban Publik	385
12.1.1 Makna Istilah Pertanggungjawaban Publik	385
12.1.2 Teori Kekuasaan (<i>Authority</i>) Dalam Pertanggungjawaban Publik	385
12.2 Sistem Pertanggungjawaban Publik	390
12.3 Siklus Pertanggungjawaban Publik	393
12.3.1 Penetapan Regulasi Pertanggungjawaban Pimpinan Organisasi	394
12.3.2 Pembentukan dan Penerbitan Sk Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Organisasi ..	394
12.3.3 Penyusunan Draft Laporan Pertanggungjawaban Organisasi	394
12.3.4 Pembahasan Draft Laporan Pertanggungjawaban Organisasi Sektor Publik	395
12.3.5 Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Organisasi Sektor Publik	395
12.3.6 Pengajuan Laporan Pertanggungjawaban Organisasi Sektor Publik ke Parlemen/Legislatif ...	395
12.3.7 Pemaparan/Pembacaan Laporan Pertanggungjawaban Organisasi oleh Kepala Organisasi di Hadapan Lembaga Legislatif/Parlemen	395
12.3.8 Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Organisasi oleh Parlemen	395
12.3.9 Penilaian dan Rekomendasi atas Laporan Pertanggungjawaban Organisasi	396
12.3.10 Penerbitan Laporan Pertanggungjawaban Organisasi	396
12.4 Teknik Pertanggungjawaban Publik	396
12.4.1 Teknik Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Publik	396
12.4.2 Penyampaian Pelaporan Pertanggungjawaban Publik	399
12.5 Contoh Pertanggungjawaban di Organisasi Sektor Publik	400
Esai	408
Soal-soal	408
Studi Kasus	409
Daftar Istilah	411
Daftar Pustaka	423
Daftar Tabel	428
Daftar Peraga	430
Daftar Kotak	431
Indeks	432